

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak lahirnya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan Negara-negara lain, Indonesia berpegang teguh pada prinsip sistem politik luar negerinya yang bersifat bebas aktif, yaitu politik Negara yang mengandung kemerdekaan dan kedaulatan Negara serta berdasarkan pada kepentingan rakyat dan bertujuan untuk perdamaian dunia.

Salah satu bentuk hubungan Indonesia dengan Negara lain adalah hubungan bilateral Indonesia dengan Negara-negara di kawasan Timur Tengah, seperti hubungan bilateral Indonesia dengan Mesir pada tahun 1947<sup>1</sup> terkait kesepakatan pembuatan perjanjian persahabatan diantara kedua Negara tersebut, hingga hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina yang sampai sekarang masih ramai untuk diperbincangkan.

Palestina adalah bangsa yang sampai sekarang terus berusaha untuk mendapatkan kedaulatan di dunia Internasional, konflik agama dan politik yang terjadi selama bertahun-tahun antara Israel dengan warga Palestina membuat Palestina menjadi terpecah menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu : wilayah Tepi Barat (West Bank) yang dikuasai oleh Fatah dan wilayah Jalur Gaza (Gaza Strip)

---

<sup>1</sup> Sunario, Politik Luar Negeri yang Bebas, Penerbit Endang, Jakarta, Hal.19

yang dikuasai oleh Hamas. Konflik ini berawal dari tahun 1947 dan berlangsung hingga sekarang. Tragedi terakhir adalah blokade Israel atas Jalur Gaza pada tanggal 8 Juli hingga 26 Agustus 2014 yang menyebabkan ribuan warga Palestina menjadi korbannya. Atas dasar tersebut, pemerintah bahkan warga negara Palestina pun tidak hanya diam. Banyak upaya yang dilakukan untuk menghentikan aksi dari Israel, namun upaya tersebut pada kenyataannya mengalami kegagalan.<sup>2</sup>

Kegagalan tersebut misalnya, pertama kali dengan cara melakukan perlawanan yang dikenal dengan Intifadah yakni perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dilakukan mulai dekade 1980-an yang hanya bersenjatakan batu-batu yang dilempar dengan alat seperti ketapel, dikarenakan orang-orang Palestina pada saat itu kurang memiliki persenjataan yang canggih. Berbeda dengan bangsa Israel yang telah menggunakan persenjataan canggih seperti roket dan rudal yang kebanyakan senjata-senjata itu disokong dari bangsa barat, terutama dari negara Amerika Serikat, sehingga hal tersebut justru menelan banyak korban dari warga Palestina.<sup>3</sup>

Tidak hanya perjuangan dari warga negara Palestina saja, ada upaya lain dalam mencari dukungan bagi negaranya. Yang mana dukungan perjuangan Palestina sering kali dibahas dalam berbagai pertemuan multilateral negara-negara dunia seperti Liga Arab, tapi hasilnya nihil. Kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk

---

<sup>2</sup> Najamuddin Muhammad, 2014, Sejarah Konflik & Peperangan Kaum Yahudi, Buku Biru

<sup>3</sup> Fauz Ahmad. 1996. Gerakan Hamas dalam Perjuangan Kemerdekaan Palestina. Jakarta: Studia Press.

membantu kemerdekaan Palestinapun sering kali digelar di berbagai negara-negara di dunia, tapi yang tersisa sampai hari ini hanyalah tinggal rencana.

Dari beberapa kegagalan upaya-upaya yang dilakukan oleh Palestina, Indonesia pun dalam hal ini tergerak untuk ikut serta membantu Palestina dimana hubungan antara Indonesia dan Palestina terbilang cukup baik. Indonesia yang merupakan Negara Dunia Ketiga berpenduduk mayoritas muslim mempunyai kesamaan pandangan dalam Agama dengan Palestina yaitu Islam, selain hal itu, hubungan yang cukup baik antara Indonesia dan Palestina juga terjalin pada ranah politik. Berdasarkan sejarah, hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina sudah lama terjalin, yaitu sejak masa peralihan Indonesia menuju kemerdekaan, Palestina merupakan bangsa pertama di kawasan Timur Tengah yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia di Radio Internasional melalui Mufti Palestina yang bernama Amin Al Husaini. Berkat jasa dari Amin inilah, kemerdekaan Indonesia mendapatkan gemanya pada masyarakat Internasional.<sup>4</sup> Hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina semakin baik setelah ditempatkannya Duta Besar Palestina untuk Indonesia pada 13 September 1993.

Adapun sikap lain yang diberikan oleh Indonesia dalam membantu Palestina, yakni berupa bantuan kemanusiaan misalnya Indonesia mendirikan rumah sakit di Gaza yang merupakan sumbangan dari bangsa Indonesia.<sup>5</sup> Pengiriman bantuan obat-

---

<sup>4</sup> Ya'cob Billy Octa, *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina Pasca Agresi Israel ke Jalur Gaza 27 Desember 2008*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009

<sup>5</sup> <http://ic-mes.org/politics/jurnal-komunikasi-internasional-indonesia-untuk-palestina/>

obatan, alat-alat medis, sarana dan prasarana medis, kendaraan medis bahkan pengirimantim dokter Indonesia pun dilakukan dalam rangka untuk merawat para korban. Disamping itu, Indonesia juga berkiprah secara aktif melalui sikap politiknya yang mana mengirimkan para diplomatnya di berbagai konferensi internasional untuk ikut andil dalam hal penyelesaian dan perdamaian di Palestina, diantaranya keikutsertaan Indonesia dalam perumusan resolusi DK PBB terkait situasi di jalur Gaza, keikutsertaan Indonesia dalam sidang International Parliamentary Union (IPU) yang diselenggarakan di Jenewa serta keikutsertaan Indonesia dalam konferensi rekonstruksi Gaza yang diselenggarakan di Mesir pada tanggal 2 Maret 2009.

Sehubungan dilaksanakannya KAA ke 60 di Bandung yang berlangsung dari tanggal 19 April hingga 24 April 2015, Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk menggalang dukungan bagi Palestina kembali yang merupakan salah satu dari tiga agenda KAA ke-60 di Bandung yang dikenal sebagai *Declaration of Palestine*.<sup>6</sup> Dalam pertemuan tersebut para Menteri Luar Negeri tentunya melakukan hubungan diplomatik dengan bahasan terkait menggalang dukungan bagi Palestina. Dalam hal ini, menteri Luar Negeri Indonesia yakni Retno LP Marsudi terus menyuarakan dan membantu Palestina untuk mencapai kedaulatannya, serta aspek terpenting yang harus diperhatikan dari pembahasan tersebut adalah komitmen negara-negara Asia-Afrika untuk memberikan bantuan kapasitas kepada Palestina dalam mempersiapkan diri saat sudah mendapatkan pengakuan. Indonesia selaku tuan rumah menjadikan isu

---

<sup>6</sup> <http://www.antarane.ws.com/berita/491754/kaa-2015-kembali-ke-palestina>

Declaration of Palestine menjadi agenda yang utama yang membutuhkan perhatian para pemimpin Asia-Afrika. Indonesia pun optimis bahwa kemerdekaan Palestina bisa diakui dan diterima oleh seluruh dunia khususnya negara-negara Asia-Afrika yang ikut mendorong dukungan kemerdekaan bagi Palestina .

Sebelum adanya KAA ke 60 di Bandung tersebut, Indonesia sebenarnya pernah mengupayakan dalam hal membela Palestina dalam merebut kemerdekaannya. Yang mana terdapat masa bahwa Indonesia pernah menggalang dukungan kemerdekaan bagi Palestina dari awal kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, yakni dari masa Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo secara garis besar. Upaya yang dilakukan Indonesia untuk membela Palestina sebelum adanya KAA misalnya semasa pemerintahan Sukarno Indonesia aktif mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, hal yang dapat dilakukan Soekarno saat itu hanya dengan bantuan dana dan lain sebagainya, diantaranya adalah Pemerintah Indonesia tak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sejak 14 Mei 1948, sewaktu Sukarno mulai menggagas Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1953, Indonesia menolak keras diikutsertakannya Israel dalam konferensi tersebut, dan perlawanan terhadap Israel kembali dilakukan oleh Sukarno ketika Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games IV pada tahun 1962. Pemerintah Indonesia tak memberikan visa kepada kontingen Israel.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> MF Mukthi, 'Soekarno dan Palestina', diakses dari <http://historia.id/modern/sukarno-dan-palestina>

Dalam kesempatan pemerintahan Soeharto ini, Soeharto ikut serta memberikan upaya pembelaan bagi Palestina melalui untuk pertama kalinya Indonesia ikut ambil bagian dalam misi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB (UNEF) untuk Timur Tengah dengan mengirimkan Pasukan Garuda 1.<sup>8</sup> Selain itu Indonesia juga mendukung Resolusi Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 194 tentang isu Palestina. Resolusi ini dikeluarkan pada 11 Desember 1948.<sup>9</sup> Isi dari resoulusi tersebut adalah Majelis Umum menegaskan bahwa harus diizinkan secepat mungkin bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai dengan tetangganya, dan demikian juga harus mendapat ganti rugi dari harta benda yang ditinggalkan, dan mendapat ganti rugi dari kerugian atau kerusakan harta benda sesuai dengan hukum internasional dan standar keadilan bagi mereka yang tidak ingin kembali lagi.

Memasuki era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia masih terus menyuarakan dukungannya melalui dunia Internasional untuk Palestina. Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia selama sepuluh tahun atau dua periode kepemimpinan dan dalam kepemimpinannya Indonesia diarahkan memang selalu mendukung Palestina. Pada masa pemerintahan SBY, beliau memberikan peran aktif dalam rangka membela Palestina melalui pengiriman surat kepada Sekjen PBB yang saat itu adalah Kofi Anan mengenai permintaan Indonesia

---

<sup>8</sup>Abdulgani, Ruslan, Hubungan Indonesia dengan Mesir dan Timur Tengah Sepanjang Sejarah, Jakarta, 1974. Hlm 40

<sup>9</sup> Rahmat, Musthafa, Abd, Jejak-jejak Juang Palestina, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002. Cetakan Pertama, hlm 274

agar PBB mengambil langkah strategis dan efektif bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel.<sup>10</sup> Selain itu melalui keikutsertaan Indonesia dalam *Annapolis Conference* akhir Desember 2008. Atas inisiatif sendiri Indonesia juga mengadakan *Asian African Conference on Capacity Building for Palestine* serta Indonesia mendukung secara penuh ketika Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1860 ditetapkan mengenai situasi jalur Gaza. Selain itu Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan *United Nations Asian and Pacific Meeting on the Question of Palestine* pada tanggal 8-10 Juni 2009.

Dimasa pemerintahan presiden Joko Widodo dalam memberikan pembelaan bagi Palestina masih sebatas seruan moral yang berupa kecaman dan dukungan saja. Yang mana hal tersebut disampaikan melalui pidato pembukaan untuk debat capres 2014.<sup>11</sup>

Kemudian, sikap Jokowi terhadap pembelaan Palestina pun terealisasikan pada saat adanya KAA ke 60 di Bandung Tahun 2015, yang mana Indonesia menjadikan agenda Palestina menjadi agenda utama dalam pembahasan konferensi tersebut. Hal yang membuat berbeda dalam memberikan pembelaan pada Palestina dari masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, SBY dan Jokowi adalah dimana pada masa pemerintahan Jokowi terdapat momentum KAA yang diselenggarakan di Bandung, dimana Konferensi Tingkat Tinggi tersebut mayoritas beranggotakan

---

<sup>10</sup> A. Bakir Ihsan, SBY dan Konflik Timur Tengah , Seputar Indonesia.

<sup>11</sup> Janji Jokowi Tentang Dukungan Penuh Terhadap Perjuangan Palestina, diakses dari <http://janjijokowi.org/janji-jokowi-tentang-dukungan-penuh-terhadap-perjuangan-palestina/>

negara-negara Dunia Ketiga di Benua Asia maupun di Benua Afrika, yang mana pada awal mula berdirinya KAA ini para negara anggota memiliki komitmen agar dapat menentukan nasibnya sendiri dalam merebut kemerdekaan. Selain itu Palestina merupakan salah satu anggota KAA yang belum mendapatkan kedaulatan secara utuh di dunia internasional.

## **B. Penegasan Judul**

Penggalangan memiliki pengertian yaitu proses atau perbuatan, dan juga bisa diartikan sebagai sebuah pengumpulan, pengertian tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan mengaplikasikan makna kata penggalangan kedalam judul skripsi ini, maksud dari penggalangan kemerdekaan adalah sebuah tindakan nyata Indonesia dalam mengumpulkan dukungan nyata dari negara-negara di dunia khususnya negara yang berada dikawasan Asia dan Afrika untuk membantu Palestina merdeka seutuhnya, diharapkan dengan penggalangan kemerdekaan tersebut akan memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan ekspansi yang dilakukannya terhadap wilayah Palestina. Lebih tepatnya, penegasan dari judul skripsi Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Menggalang Dukungan Kemerdekaan Palestina di KAA ke 60 di Bandung Tahun 2015 ini adalah komunikasi internasional Indonesia dalam upaya mendukung Palestina sebagai negara yang berdaulat. Ada beberapa dukungan yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam sebuah forum internasional, seperti pada saat Sidang Majelis Umum PBB, didalam sidang umum yang diadakan di kota New York tersebut, tepatnya pada tanggal 29 September



2012. Dalam sidang ini upaya PBB menaikkan status Palestina dari yang sebelumnya entitas peminat yang diwakili oleh Palestine Liberation Organization (PLO) menjadi entitas pemantau. Kenaikan status Palestina dalam keanggotaan PBB tersebut melewati mekanisme voting, dimana sebanyak 138 negara anggota tetap PBB setuju, 9 negara menyatakan menolak kenaikan status Palestina tersebut, dan 41 negara memutuskan abstain. Indonesia pada saat Sidang Umum PBB tersebut memiliki stance kuat untuk mendukung penuh terhadap kenaikan status Palestina menjadi entitas pemantau, delegasi Indonesia saat itu langsung dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Marty Natalegawa.<sup>12</sup>

Pada tahun 2015, Indonesia memiliki momentum untuk kembali melakukan penggalangan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melewati sebuah forum Konferensi Asia Afrika ke 60 dimana Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah. Indonesia menjadikan penggalangan dukungan terhadap Palestina sebagai salah satu dari tiga agenda yang akan dibahas dalam forum tersebut. Melalui konferensi Asia Afrika ke 60 ini, Indonesia memiliki tujuan untuk meyakinkan kembali kepada negara-negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika bagi yang sudah mendukung untuk lebih yakin lagi terhadap dukungan yang diberikan dan bagi negara yang belum memberikan dukungan untuk memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Jadi Indonesia mengharapkan dengan adanya momentum KAA ini akan menjadikan negara-negara kawasan Asia dan Afrika memiliki satu tujuan untuk

---

<sup>12</sup>[http://www.academia.edu/4964281/Komunikasi\\_Internasional\\_Indonesia\\_Dalam\\_Upaya\\_Mendukung\\_Palestina\\_Sebagai\\_Negara\\_yang\\_Berdaulat\\_Tema\\_Komunikasi\\_Internasional\\_Indonesia](http://www.academia.edu/4964281/Komunikasi_Internasional_Indonesia_Dalam_Upaya_Mendukung_Palestina_Sebagai_Negara_yang_Berdaulat_Tema_Komunikasi_Internasional_Indonesia)

mendukung penuh terhadap kemerdekaan negara Palestina, dan pada kenyataannya bahwa Palestina merupakan salah satu negara anggota KAA yang belum mendapatkan kedaulatan secara utuh di dunia internasional.

### **C. Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat di tarik sebuah pokok permasalahannya, yaitu :

**“ Mengapa Pemerintah Republik Indonesia Menggalang Kembali Dukungan Kemerdekaan bagi Palestina di KAA ke 60 di Bandung ?”.**

### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam studi ilmu-ilmu sosial terutama ilmu hubungan internasional, teori menjadi sebuah alat analisa utama yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi. Teori juga dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, sehingga berteori dapat diartikan pekerjaan yang menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.<sup>13</sup>

#### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Pada dasarnya politik luar negeri merupakan *Action Theory*, politik luar negeri suatu negara ditujukan untuk mencapai suatu kepentingan tertentu terhadap negara

---

<sup>13</sup> Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, 1999, Hal 185.

lain. Politik luar negeri merupakan suatu tindakan, sikap atau arahan suatu negara untuk mencapai kepentingan dinegara lain.

Tujuan dari dilaksanakannya politik luar negeri adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsep yang paling banyak digunakan sebagai unsur suatu negara untuk mencapai kebutuhan negaranya. Unsur tersebut mencakup ekonomi, keamanan militer, ideology, dan kepentingan internasional yang didalamnya berkaitan dengan national prestige.

Konsep kepentingan internasional merujuk untuk mengukur peran suatu negara dalam mencapai kekuasaannya di negara lain dan perilakunya di negara lain. Kepentingan Nasional merupakan suatu esensi dari hubungan internasional selain power dan actors. Pada umumnya kaum realis merujuk arti kepentingan untuk mendapatkan sebuah kekuatan/power, power tersebut dapat digunakan suatu negara untuk mengontrol negara lain.

**Hans J. Morgenthau** mengungkapkan :

Kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain (Nicnic hal. 32). Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional serupa dengan ‘konsep umum’ konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal yaitu kesejahteraan umum (general welfare) dan hak perlindungan hukum. Konsep tersebut memuat arti minimum yang inheren di

dalam konsep itu sendiri yang mana adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Dengan kata lain hakekat kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah power (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan).

Kepentingan Nasional adalah konsep kunci dalam politik luar negeri.<sup>14</sup> Konsep ini merupakan konsep yang paling banyak digunakan untuk mengukur, melihat dan menganalisa perilaku internasional suatu negara. Maka itu kepentingan nasional merupakan suatu cara untuk mengetahui perilaku politik luar negeri suatu negara, karena suatu negara selalu ingin mencapai kepentingannya.

Menurut Morgenthau negarawan-negarawan yang paling berhasil dalam sejarah adalah mereka yang berusaha memelihara “kepentingan nasional”, yang didefinisikan sebagai “penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian negara-bangsa.” Maka dari itu suatu negara dikatakan berhasil jika kepentingannya telah tercapai dan dapat dipelihara.

Dalam menjangkau kepentingannya negara melakukan peninjau dengan cara diplomatic. Dalam aspek diplomasi kepentingan nasional sebagai prinsip diplomasi untuk kebaikan bagi rakyat negaranya<sup>15</sup> sehingga strategi awal diplomasi adalah untuk mencapai kepentingan Internasional.

---

<sup>14</sup> J. Frankel, 1991, Hubungan Internasional, Jakarta, Bima Aksara, hal 45

<sup>15</sup> Rosaliajasmine-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\_detail-84819-SOH101 (Pengantar Ilmu Hubungan Internasional) Kepentingan Nasional.html

Kepentingan nasional merupakan tujuan awal bagi para pembuat keputusan untuk melancarkan politik luar negeri suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain dan sebagai upaya untuk melancarkan kepentingan nasional negaranya. Banyaknya kepentingan nasional antarnegara menyebabkan terjadinya kesulitan suatu negara dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya dikasus Palestina dan Israel, banyak upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menemukan titik perdamaian diantara keduanya, hal tersebut tidak lain agar Indonesia mencapai suatu kepentingan nasionalnya.

Dengan demikian dapat dilihat setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya setiap negara mencari kepentingan atas ekonomi, keamanan militer, ideology dan *national prestige*. Namun dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, Indonesia hanya memiliki dua kepentingan yang ingin dicapainya dalam rangka memberikan bantuan kepada Palestina melalui KAA ini, yakni kepentingan ideology dan national prestige.

Indonesia melalui pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri Indonesia mengancam tindakan Israel tersebut dan melakukan suatu kebijakan berupa penggalangan dukungan bagi Palestina. Dimana dari konflik yang terjadi, kepentingan Indonesia lewat politik luar negerinya yang bersifat bebas dan aktif adalah secara konsisten membela dan mendukung perjuangan warga Palestina demi terwujudnya perdamaian dan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat. Dengan dilatarbelakangi Indonesia dan Palestina yang memiliki persamaan Ideologi yakni Islam yang

menyebabkan hubungan antara kedua negara ini terbilang baik, serta Indonesia menentang segala macam bentuk penjajahan di dunia yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku Indonesia. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia melakukan penggalangan dukungan tersebut atas dasar untuk mendapatkan pandangan yang baik atau dengan kata lain sebuah pencitraan baik dari dunia internasional kepada Indonesia. Dimana pencitraan ini merupakan salah satu kebutuhan Indonesia sendiri dalam menjalin suatu hubungan internasional, yang dapat memperlihatkan eksistensi Indonesia berperan dalam dunia internasional. Hal ini berlandaskan dengan adanya kepentingan internasional atau dengan kata lain national prestige yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan menggunakan landasan Dasar Hukum Politik Luar Negeri Indonesia yakni, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 3882), BAB I Ketentuan Umum . Yang sesuai pada :

#### **Pasal 2**

“Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara”

#### **Pasal 4**

“Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan”

Selain itu, pencitraan atau national prestige yang ingin dicapai oleh Indonesia ini berkaitan dengan program Departemen Luar Negeri Indonesia yang tercantum di Landasan, Visi, dan Misi Polugri, tepatnya pada no. 5 :

### **Tujuan Kementerian Luar Negeri**

Tujuan Kementerian Luar Negeri disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Luar Negeri. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

#### **Gambar I.I Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri Indonesia**

1. Mewujudkan peningkatan dan penguatan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
2. Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara dan organisasi internasional di kawasan Amerika dan Eropa.
3. Mewujudkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN, ikut mendorong proses integrasi komunitas ASEAN 2015 yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang mandiri, maju, bersatu, demokratis, aman, adil, makmur dan sejahtera.
4. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, serta meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui

penguatan kerja sama regional dan multilateral.

5. Memperkuat citra Indonesia melalui penyediaan informasi yang akurat dan peningkatan pemahaman pemangku kepentingan di dalam negeri dan masyarakat internasional terhadap politik luar negeri.

6. Mengoptimalkan diplomasi melalui pengelolaan hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politik, hukum, teknis dan keamanan.

7. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri.

8. Meningkatkan kualitas politik luar negeri, melalui pengkajian dan pengembangan kebijakan, sehingga mampu memperjuangkan kepentingan nasional secara efektif.

9. Meningkatkan kualitas pengawasan intern Kementerian Luar Negeri untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Meningkatkan struktur kelembagaan, SDM, sarana prasarana, koordinasi perencanaan, pengelolaan, pelaporan kinerja dan anggaran serta dukungan administratif lainnya bagi keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri.

*Sumber : <http://www.kemlu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=19&l=id>*

Berdasarkan kepentingan nasional yang berkaitan dengan unsur kepentingan ideologi dan kepentingan internasional yang berkaitan dengan national prestige serta berdasarkan tujuan dari program Kemenlu Republik Indonesia inilah Indonesia melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui



dukungan di berbagai forum dan khususnya di KAA ke 60 dalam hal ini serta melalui bentuk bantuan kemanusiaan.

## **2. Konsep Diplomasi**

Menurut S.L. Roy, kata Diplomasi diyakini berasal dari kata Yunani *Diploun* yang berarti Melipat. Menurut Nicholson, pada masa kekaisaran Romawi semua paspor yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak dalam piringan logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas, surat jalan ini disebut *Diplomas*. Selanjutnya kata ini berkembang dan mencakup pula dokumen-dokumen resmi yang bukan logam, khususnya yang memberi hak istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing di luar bangsa Romawi. Karena perjanjian-perjanjian ini semakin bertumpuk, arsip kekaisaran menjadi beban dengan dokumen-dokumen kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dilipat dan diberikan dalam cara khusus.

Oleh karena itu dirasa perlu untuk mempekerjakan seseorang yang terlatih untuk mengindeks, mengurai dan memeliharanya. Isi surat resmi Negara yang dikumpulkan, disimpan diarsip, yang berhubungan dengan hubungan internasional dikenal pada Jaman Pertengahan sebagai *Diplomatious* dan *Diplomatique*. Siapapun yang berhubungan dengan surat-surat tersebut dikatakan sebagai milik *Res Diplomatique* atau Bisnis diplomatic. Dari peristiwa ini lama kelamaan kata

Diplomasi menjadi dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional, dan siapapun yang ikut mengaturnya dianggap Diplomat.<sup>16</sup>

Secara definisi, dalam kamus The Oxford English Dictionary, Diplomasi diartikan sebagai : “manajemen hubungan internasional melalui organisasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat”.<sup>17</sup>

Menurut KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan “Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain”.<sup>18</sup>

Adapun tipe Diplomasi yang dapat diterapkan Indonesia terkait konflik yang terjadi antara Palestina-Israel adalah Diplomasi Konperensi. Diplomasi Konperensi pertama kali muncul pada awal abad dua puluh, yaitu pada perang dunia pertama. Pada awalnya, tujuan awal kemunculan Diplomasi Konperensi ini adalah pembentukan sebuah Konfrensi untuk membicarakan masalah-masalah mendesak tentang startegi dan politik demi keberhasilan perang, seperti membicarakan tentang pelaksanaan perang gabungan, pembelian material perang dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> S.L. Roy, *Diplomacy* (edisi Indonesia), Yogyakarta, 1990. Hal 2

<sup>17</sup> S.L. Roy, *Diplomacy* (edisi Indonesia), Yogyakarta, 1990. Hal 2

<sup>18</sup> Ibid. Hal 4

Sejalan dengan waktu, Konfrensi ini berkembang menjadi lembaga-lembaga yang lebih dari sekedar mekanisme koordinasi masa perang. Pasca PD I, Diplomasi Konperensi ini berwujud LBB (yang sekarang berubah menjadi PBB), dimana para wakil Negara-negara membicarakan kepentingan yang saling menguntungkan atau bahkan saling bertentangan, dan berusaha memecahkan melalui perundingan. Sebagaimana Sir Thomas Hovet Jr. mengatakan “yang mendasar bagi jenis diplomasi ini adalah keyakinan akan pentingnya pendapat umum dunia, dengan memfokuskan pendapat umum suatu keadaan, diperkirakan perhatian umum itu akan mampu mendinginkan situasi dan mencegah rentetan peristiwa yang bisa mengarah kepada konflik”.<sup>19</sup>

Lewat jalan diplomasi ini, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pihak-pihak yang terkait berupaya untuk membantu mewujudkan perdamaian antara Palestina-Israel. Upaya Indonesia, atas permintaan Palestina, membantu melobi negara-negara lain agar melakukan penggalangandukungan bagi Palestina.<sup>20</sup>

Hal ini terbukti dari keikutsertaan Indonesia dalam *Annapolis Conference*, sebuah konferensi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, pada akhir Desember 2008 lalu. Indonesia juga diundang pada Konfrensi Paris guna memberikan dukungan ekonomi bagi Palestina, dan atas inisiatif sendiri, Indonesia

---

<sup>19</sup> Ibid. Hal 112

<sup>20</sup> Wisnu Dewa Brata, Sidang Majelis Umum PBB : Sikap Aktif Indonesia di Kancah Dunia, 2015. Koran Kompas Edisi Minggu 04 Oktober 2015.

mengadakan *Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine*. Tidak hanya itu, ketika Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1860 mengenai Situasi di Jalur Gaza telah ditetapkan, Indonesia sepenuhnya mendukung Resolusi tersebut, yang disinyalir sebagai jalan utama untuk mendatangkan perdamaian di Jalur Gaza.

Selanjutnya, disusul dengan upaya pemerintah Republik Indonesia yakni dengan cara memanfaatkan momentum dimana Indonesia selaku tuan rumah KAA ke 60 di Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2015 untuk melakukan penggalangan dukungan bagi Palestina kembali yang merupakan agenda utama yang dibahas dalam KAA ke 60 di Bandung tersebut yang dikenal sebagai Declaration of Palestine. Dengan adanya momen tersebut, Indonesia berharap berhasil melakukan negosiasi sebagai bentuk dari sikap diplomasi Indonesia kepada negara-negara anggota KAA untuk dapat ikut serta membicarakan dan memberikan mendukung pengakuan bagi Palestina demi terwujudnya negar Palestina yang berdaulat.

#### **E. Hipotesa**

Pemerintah Replublik Indonesia menggalang kembali dukungan kemerdekaan bagi Palestina di KAA ke 60 di Bandung, karena :

1. Secara konsisten Indonesia benar membela dan mendukung demi terwujudnya perdamaian di dunia. Yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia yang

tertuang dalam Pancasila sila kedua dan pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama dan keempat.<sup>21</sup>

2. Pencintaan baik bagi Indonesia sendiri terhadap dunia Internasional yang mana hal itu terkait dengan unsur national prestige dalam suatu konsep kepentingan nasional.

## **F. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah tentunya untuk menjawab rumusan masalah yang relevan dengan adanya fakta dan bukti. Yang mana rumusan masalah tersebut berkaitan dengan alasan mengapa Indonesia menggalang dukungan bagi Palestina. Selain itu untuk memberikan gambaran mengenai upaya Indonesia dalam membantu Palestina mendapatkan pengakuan kemerdekaannya. Dimana Indonesia memanfaatkan momentum KAA ke 60 di Bandung untuk menggalang dukungan tersebut. Dan penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi khasanah ilmu pengetahuan, serta dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori yang pernah diperoleh penulis selama kuliah. Selain itu tujuan penulisan ini adalah akan dijadikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

---

<sup>21</sup> Putra A. Bardin, Pembukaan UUD 1945. Jakarta, 1990. Hal 5

## **G. Jangkauan Penulisan**

Batasan penelitian pada pembahasan ini adalah upaya dari Indonesia untuk membantu Palestina dari era Presiden SBY hingga memasuki era Presiden Jokowi dan juga alasan mengapa Indonesia menggalang dukungan bagi Palestina kembali dalam momentum peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60 di Bandung tahun 2015. Namun tidak menutup kemungkinan penulis ini juga akan mencantumkan peristiwa-peristiwa yang terkait di selain waktu tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini yaitu metode secara kualitatif, yakni dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari berbagai literature seperti buku-buku ilmiah, journal-journal ilmiah, majalah-majalah, media cetak, media elektronik, dan literatur lainnya yang dapat mendukung pembuatan tulisan ini. Setelah pengumpulan data dilakukan, selanjutnya adalah pengklarifikasian data, kemudian melakukan analisis secara induktif dari berbagai media. Yang selanjutnya dilakukan dengan cara menyimpulkan berbagai data tersebut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari Bab ke Bab, yakni antara lain :

- Bab I Pada bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesis, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Pada bab ini merupakan uraian tentang upaya dunia internasional dalam membantu memerdekakan Palestina. Upaya apa saja yang dilakukan untuk membantu Palestina mewujudkan negara Palestina yang berdaulat.
- Bab III Pada bab ini merupakan dinamika politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Bagaimana politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Presiden Jokowi.
- Bab IV Pada bab ini merupakan alasan Indonesia melakukan penggalangan dukungan bagi Palestina di KAA ke 60 di Bandung Tahun 2015. Apa yang ingin dicapai Indonesia atas upaya yang dilakukan untuk Palestina.
- Bab V Kesimpulan.